

## Bab VII

# KELAS DAN SEKOLAH SEBAGAI SISTEM SOSIAL

### A. Kelas sebagai Sistem Sosial

di sana terdapat Dalam perspektif sosiologi, kelas merupakan bagian dari mikrososiologi yang menelaah kehidupan kelompok sosial di sekolah dengan keseluruhan dinamika yang terjadi di dalamnya. Di sana terdapat gabungan dari individu-individu yang membentuk suatu kelompok sosial yang teratur dan memiliki fungsi dan peran yang kompleks dalam kacamata pendidikan. Ruang kelas memenuhi standar definisi kelompok sosial karena sekumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi (Horton dan Hunt, 1984). Hakikat keberadaan kelompok sosial bukan tergantung dari dekatnya jarak fisik, melainkan pada kesadaran untuk berinteraksi, sehingga kelas bersifat permanen dan tidak hanya suatu agregasi atau kolektivitas semata. Pada akhirnya, peran dan fungsi yang diembannya dalam struktur pendidikan lebih terjamin.

#### 1. Struktur Sosial Kelas

Ruang kelas merupakan miniatur dari kelompok yang lebih besar, yaitu masyarakat karena di sana berkumpul person-person dari latar belakang status sosial dan ekonomi yang berbeda-beda, meskipun dengan struktur profesi dan peran yang sama. Beberapa ciri khas struktur kelas yang memiliki kesamaan dengan masyarakat adalah sebagai berikut.

##### a. Komposisi Anggota

Heterogenitas adalah aspek umum yang hampir selalu ada di kelas manapun. Di sana, selain latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, juga terdapat perbedaan jenis kelamin (seksualitas) kecuali di sekolah khusus, keberagaman agama, sampai pada karakteristik individu yang saling berlainan secara fisik maupun psikis yang ditandai dengan perbedaan antarpersonalnya.

Keberagaman komposisi kelas merupakan warna yang biasa, seperti halnya dalam masyarakat karena institusi pendidikan berlaku universal yang memberi kebebasan bagi siapa saja yang memenuhi syarat untuk bergabung.

##### b. Struktur Birokratis Berupa Peran dan Status

Di dalam kelas yang majemuk itu, terdapat suatu tata aturan kelas yang diikat oleh sekolah dan diperankan oleh wakil-wakil siswa yang disebut pengurus kelas. Lahirlah berbagai "jabatan" yang terbentuk secara hierarkis sesuai dengan tugas dan kewenangan mereka di dalam kelas, baik itu oleh guru yang berperan sebagai wali kelas maupun siswa-siswanya yang terakumulasi dalam jabatan ketua kelas, sekretaris, bendahara, dan seterusnya.

Pola imitatif yang dibawa dari lingkup luar masyarakat ini tersusun karena diperlukannya sistem penegakan tata aturan institusi serta pola pengendalian sosial yang ketat mengingat fungsi dunia pendidikan yang sedemikian nyata sehingga memerlukan tindakan konkret untuk pelestarian fungsi institusi dan segenap norma-norma kelas dan sekolah tersebut. Salah satu bentuknya adalah penetapan status birokratis dari unsur-unsur kelas yang merepresentasikan anggota-anggotanya sebagai wujud dari masyarakat kecil.

#### 2. Pola Komunikasi dalam Kelas

Komunikasi menjadi elemen penting dalam segala kegiatan di kelas karena memungkinkan adanya pertukaran interaksi timbal balik antara warga kelas (murid-murid ataupun murid-guru). Selain itu, arti penting komunikasi dalam pencapaian tujuan belajar di kelas adalah untuk mengkomunikasikan dan menyalurkan informasi dan keterampilan. Konsekuensi logisnya, setiap kelas memerlukan adanya pola alur komunikasi yang berjalan secara lancar dan efektif dari masing-masing pihak.

Aktivitas penyampaian informasi dari guru dijelaskan dalam berbagai paparan tentang materi pelajaran beserta penjelasannya yang kadang disertai dengan berbagai tugas dan pertanyaan yang disampaikan kepada murid sebagai bentuk komunikasi dari guru. Sebaliknya siswa bisa merespon dengan bertanya, menjawab, berdiskusi dengan teman sekelas dan sebagainya, manapun dengan aktivitas di luar pelajaran. Namun, aspek ini tidak sese-

derhana itu, melainkan dititikberatkan pada peran komunikasi dalam keberlangsungan kelas, sesuai dengan beberapa eksperimen tentang komunikasi kelas oleh beberapa ahli, antara lain oleh Bavelas dan Leavit (dalam Horton dan Hunt, 1999), yang menghasilkan beberapa pola komunikasi yang telah diuji dalam eksperimennya tahun 1958. Hasil eksperimen tersebut mendeskripsikan 4 bentuk komunikasi yang terskema dalam tabel berikut.

Variabel Komunikasi Model	Respon Anggota	Kepemimpinan	Organisasi	Sifat	Efek bagi Anggota
Melingkar	Aktif	Tidak ada	Tidak Teratur	Tidak Menentu	Tidak disegani
Rantai	Aktif	Sejajar	Tidak Teratur	Tidak Menentu	Puas
Bentuk Y	Kurang Aktif	Tidak Terpusat	Terorganisir	Menentu	Kurang pas
Terpusat (Setir)	Kurang Aktif	Terpusat dan Berbobot	Terorganisir baik	Menentu	Tidak Puas

Tabel 1 : Empat Model Komunikasi dalam Kelas (Horton dan Hunt, 1999)

Hasil kesimpulan dari eksperimen tersebut adalah bahwasanya pola komunikasi mempengaruhi kegiatan, kepuasan, kecepatan dan kecermatan dalam menemukan permasalahan baik pada tingkat individu maupun kelompok. Dua pola keempat (terpusat/setir) di mana dalam pola melingkar terjadi pemerataan peran dan status serta kepemimpinan masing-masing anggotanya, terdapat keaktifan anggota dan seluruh anggotanya puas terhadap kinerja meskipun kelompok masih sedikit melakukan kesalahan dalam memecahkan masalah. Sebaliknya pada tipe yang terpusat, mereka cenderung terorganisasi secara cepat dalam memecahkan masalah dengan kesalahan yang relatif sedikit, kelompok tersebut sangat kuat dan stabil walaupun seluruh kegiatan kelompok itu belum tentu memuaskan semua anggotanya. Leavit mengatakan bahwasanya pemusatan ini dianggap karena posisi pemimpinnya yang fungsi utamanya menerima, mengorganisasi dan mengirim

berita. Dalam hal ini, secara faktor kesemuanya terwujud dalam bentuk kegiatan belajar kelas yang selama ini diterapkan yaitu sentralisasi peran guru yang sangat besar. Selama ini, guru memang menjadi pusat komunikasi kelas dan mendominasi setiap kegiatan penyaluran informasi ini melalui penyampaian materi pelajaran, memberikan pertanyaan, mendeskripsikan penjelasan dan lain sebagainya.

Model komunikasi secara terpusat ini mengandung beberapa implikasi yaitu, pertama, struktur komunikasi kelas dimaksud paling tidak memuaskan seluruh anggota kelompok, kecuali anggota yang paling sentral (dalam hal ini adalah guru). Kedua, tipe kelompok ini dianggap paling produktif dalam menyelesaikan secara tepat tugas-tugas yang jelas strukturnya, akan tetapi hal ini sebenarnya merupakan hasil tindakan orang yang memegang peranan sentral. Pola komunikasi kelompok ini sangat terpusat (*highly centralized group*) tampak sangat teratur dan efisien dikarenakan tindakan anggotanya yang pasif. Dengan kata lain, komunikasi yang terbentuk hanyalah komunikasi dengan pemimpinnya saja. Dalam sistem ini, pemegang peranan sentral akan banyak bisa belajar dan merasa puas dengan posisi dan kelompoknya akan tetapi efeknya, individu lain tidak banyak memperoleh kesempatan untuk belajar.

### 3. Iklim Sosial di Kelas

Kelas merupakan perwujudan masyarakat heterogen kecil di mana di dalamnya terdapat variasi komposisi dan hubungan antarpersonal yang melahirkan mekanisme interaksi sosial yang kontinu. Mekanisme ini terus berlanjut dalam lingkup sosialnya (di kelas) dan secara faktual terakumulasi ke dalam bentuk-bentuk hubungan antara individu-individu di dalam suatu kelas ataupun hubungan kelompok.

Hal terpenting adalah interelasi yang terjadi antara guru dengan murid yang melambangkan bentuk konkret dari suasana kelas dan membentuk suatu iklim sosial. Pembentukan iklim sosial kelas sangat bergantung pada variasi hubungan guru-murid serta alur penerimaan informasi dan komunikasi yang kesemuanya dinaungi dalam sebuah koridor gaya kepemimpinan dari seorang guru, baik yang mengikuti kepemimpinan terpusat (sentralistik), demokratis maupun gaya kepemimpinan yang memberi

kebebasan penuh (*laissez faire*) kepada para muridnya. Dari perpaduan itulah terbentuk berbagai macam iklim sosial di kelas yang merefleksikan bentuk hubungan vertikal kelas antara guru-murid dalam kegiatan belajar di dalam kelas yang sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam kegiatan belajar ataupun bersosialisasi didalamnya.

Menurut Faisal dan Yasik (1985) terdapat enam iklim sosial yang timbul di kelas yaitu sebagai berikut.

#### a. Iklim Terbuka

Dalam iklim terbuka ini, tingkah laku guru menggambarkan integrasi antara kepribadian seorang guru sebagai individu dan peranannya sebagai pimpinan di dalam kelas. Dia selain memberikan kritik, juga mau menerima kritikan dari para siswa. Hubungan guru dengan siswa bersifat fleksibel sehingga suasana ini dapat mempertinggi kreativitas siswa karena mereka dapat bekerja sama dan berkreasi tanpa adanya beban mental.

Kebijaksanaan yang diambil seorang guru biasanya memberikan kemudahan bagi setiap siswa untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Efeknya, setiap murid biasanya dapat memperoleh kepuasan dalam melaksanakan tugas hubungan ini serta dapat memperlancar jalannya organisasi di kelas maupun organisasi di sekolah yang lebih luas.

#### b. Iklim Mandiri

Dalam bentuk ini, masing-masing mendasarkan pada kemampuan dan tanggung jawab yang mereka miliki. Para siswa mendapatkan kebebasan dari guru untuk mendapatkan kebebasan kebutuhan belajar dan kebutuhan sosial mereka. Mereka tidak terlalu dibebani dengan tugas-tugas yang berat dan menyulitkan mereka.

Untuk memperlancar tugas siswa, seorang guru membuat prosedur dan peraturan yang jelas, yang dikomunikasikan di dalam kelas. Yang lebih esensial dalam iklim mandiri ini, antara guru dan siswa bekerja sama dengan baik, penuh tenggang rasa, dan penuh kesungguhan hati. Kepercayaan dan tanggung jawab masing-masing membuat guru memberikan kelonggaran-

kelonggaran sehingga kontrol yang ketat tidak diperlukan karena para murid dipercaya memiliki moral yang cukup tinggi.

#### c. Iklim Terkontrol

Dalam iklim terkontrol ini, titik sentral kebijakan seorang guru adalah menekankan pada pencapaian prestasi siswa di kelas, tetapi di sisi lain justru mengorbankan kepuasan kebutuhan sosial siswa. Oleh karena tuntutan ini, para guru menjalankan komando mengajar secara kaku dan keras serta siswa diharuskan menjalankan kegiatan belajar dengan keras. Mereka akhirnya sibuk dengan kesibukannya sendiri-sendiri sehingga tidak bisa mendapat kesempatan untuk membentuk hubungan kerja yang lebih akrab dan sosialitas tinggi. Hubungan pribadi sesama siswa jarang dilaksanakan karena mereka sibuk dengan pekerjaan atau tugas mereka sendiri-sendiri yang dituntut prestasi dan keberhasilan nyata.

Fungsi pimpinan sangat dominan karena tidak adanya fleksibilitas dalam organisasi kelas tersebut. Setiap pembelajaran yang telah terjadwal dijalankan secara ketat dan *full* dan untuk menjaga keberlangsungan belajarnya guru menerangkan aturan yang keras dan disertai sanksi fisik atau nonfisik yang berlaku mulai saat itu juga.

#### d. Iklim Persaudaraan

Pada jenis ini, hubungan yang terjadi antara guru dan siswa sangat erat, baik dalam kegiatan belajar maupun kegiatan di luar itu. Kepuasan terhadap pemenuhan kebutuhan sosial sangat menonjol, tetapi umumnya guru kurang mempunyai kegiatan yang berorientasi pada *fase oriented*.

Para siswa tidak dibebani dengan tugas-tugas yang menyulitkan, sebab guru berusaha agar para siswa dapat bekerja semudah mungkin dan merasa bahagia. Kelas merupakan satu ikatan keluarga sehingga di antara mereka banyak terjalin komunikasi dan saling menasihati. Pendekatan guru terhadap anak didiknya sangat personal walaupun masih memerankan diri mereka sebagai pimpinan. Dalam kelas seperti ini tidak banyak aturan yang digunakan sebagai pedoman sehingga akibatnya tugas belajar kurang diperhatikan. Pengaruh lainnya, prestasi belajar kurang optimal karena tidak pernah mendapatkan kritik.

#### e. Iklim Tertutup

Dalam model ini, seorang guru tidak memberikan kepemimpinan yang memadai kepada para siswa. Ia mengharapkan agar setiap siswa mengembangkan inisiatif masing-masing. Namun ia tidak memberi kebebasan kepada para siswa untuk merealisasikan inisiatif tersebut secara nyata karena tidak adanya keterbukaan dan komunikasi yang efektif.

Antara siswa yang satu dengan yang lain kurang dapat bekerja sama dengan baik. Akibatnya, prestasi yang dicapai pun rendah karena seringkali timbul perbedaan persepsi dan pandangan tentang prestasi yang harus ditargetkan. Para guru menerapkan aturan-aturan yang semuanya bersifat sepihak dan kurang memperhatikan kepentingan siswa.

### B. Sekolah sebagai Sistem Sosial

#### 1. Sekolah sebagai Organisasi Pendidikan Formal

##### a. Pengertian Organisasi Formal

Organisasi secara umum dapat diartikan memberi struktur atau susunan yakni dalam penyusunan atau penempatan orang-orang dalam suatu kelompok kerja sama, dengan maksud menempatkan hubungan antara orang dalam kewajiban-kewajiban, hak-hak dan tanggung jawab masing-masing. Penentuan struktur hubungan tugas dan tanggung jawab itu dimaksudkan agar tersusun suatu pola kegiatan untuk menuju ke arah tercapainya tujuan bersama.

Dengan kata lain organisasi adalah aktivitas dalam membagi-bagi kerja, menggolong-golongkan jenis pekerjaan, memberi wewenang, menetapkan saluran perintah dan tanggung jawab.

Sebagaimana terangkum dalam Liweri (1997) beberapa ahli mengemukakan pengertian tentang organisasi. Victor A. Thompson, 1969 menyatakan bahwa sebuah organisasi adalah integrasi impersonal dan sangat rasional atas sejumlah spesialis yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Chester I. Barnard, 1970 mendefinisikan organisasi sebagai sebuah sistem yang memaksakan koordinasi kerja antara dua orang atau lebih. E. Wright Bakke, 1967 mengatakan suatu organisasi adalah suatu sistem yang berkelanjutan atas kegiatan manusia yang ber-

macam-macam dan terkoordinasi berupa pemanfaatan, perubahan dan penyatuan segenap sumber-sumber manusia, materi dan modal, gagasan dan sumber alam untuk memenuhi suatu kebutuhan manusia tertentu dalam interaksinya dengan sistem-sistem kegiatan manusia dan sumber-sumbernya yang lain, dalam suatu lingkungan tertentu.

Masing-masing pendapat di atas berbeda-beda pendekatan definitifnya, sebab hal itu disesuaikan dengan konteks dan perspektif orang yang "mendefinisikannya". Meskipun begitu dari perspektif yang berbeda-beda dapat kita tarik kesamaan teoritis mengenai organisasi, yaitu sebagai berikut.

- 1) Mempunyai tujuan tertentu dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia;
- 2) Mempunyai hubungan sekunder (impersonal);
- 3) Mempunyai tujuan khusus dan terbatas;
- 4) Mempunyai kegiatan kerja sama pendukung;
- 5) Terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas;
- 6) Menghasilkan barang atau jasa untuk lingkungan, dan
- 7) Sangat terpengaruh dengan setiap perubahan lingkungan.

##### b. Sekolah sebagai Organisasi

Pada masyarakat modern kehidupan manusia tidak pernah lepas dari pergulatan aktivitasnya dengan organisasi. Secara historis, keberadaan organisasi merupakan cerminan tingkat kemajuan masyarakat yang sudah tinggi. Masyarakat tersebut telah mengembangkan satu bentuk perekat hubungan yang dinamakan solidaritas organik. Jenis solidaritas ini merupakan bentuk solidaritas yang mengikat masyarakat kompleks, masyarakat yang telah mengenal pembagian kerja secara rinci dan dipersatukan oleh rasa ketergantungan antarbagian. Tiap anggota menjalankan peran berbeda dan di antara berbagai peran tersebut menumbuhkan rasa saling tergantung seperti layaknya sistem hubungan antarbagian dalam organisme biologis.

Masyarakat modern memanfaatkan fungsi lembaga-lembaga sosialnya dengan pola hubungan dan orientasi sistem jaringan kerja yang sistematis, termekanisasi dalam pola-pola kegiatan yang formal, impersonal, terstruktur dan rasional. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari organisasi.

Dalam hal pendidikan masyarakat membutuhkan sekolah, universitas maupun institusi departemen yang mengelola sistem pendidikan negara. Pelayanan kebutuhan konsumsi manusia telah diambil alih oleh produk-produk industri barang dan jasa, distribusi dengan sarana transportasi berteknologi tinggi serta melengkapinya dengan lapangan profesi pekerjaan yang spesifik. Masyarakat membutuhkan rumah sakit untuk melayani penderita, "plaza" untuk perbelanjaan, bank untuk menyimpan dan mengambil uang, hotel untuk menginap, kantor pemerintah untuk melayani urusan pemerintah atau pembangunan dan kemasyarakatan. Tidak mengherankan apabila seluruh masyarakat memusatkan perhatiannya terhadap organisasi, terutama melalui tampilan peran, tugas dan fungsi organisasi.

Untuk dunia pendidikan, kerangka sosiologi sebagai ilmu kemasyarakatan menunjukkan bahwa masyarakat sangat memerlukan kehadiran organisasi pendidikan beserta institusi sosialnya guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Oleh karena itu, keberadaan sekolah sebagai salah satu institusi pendidikan formal merupakan keniscayaan historis dari tingkat perkembangan pranata sosial lembaga pendidikan di zaman modern. Sekolah sebagai inti pranata pendidikan manusia modern sudah seharusnya menggunakan perangkat-perangkat yang dimiliki organisasi modern.

Dari wujudnya, sekolah merupakan organisasi yang memiliki komponen-komponennya dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah organisasi formal. Beberapa kriteria organisasi yang diuraikan di bagian atas dapat kita lihat manifestasi spesifik dalam lembaga sekolah. Pertama, seperti halnya organisasi bisnis atau sebuah rumah sakit sekolah memiliki tujuan kelembagaan yang jelas. Kedua, dalam organisasi sekolah juga terdapat pola jaringan kerja dari sejumlah posisi yang saling berkaitan (seperti guru, supervisor dan adminstrator) dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Analisis organisasional mengetengahkan bahwa sekolah mengemban fungsi sebagai lembaga yang memberi pengetahuan dan keterampilan kepada anak didik, dengan mengkoordinasikan individu-individu yang memiliki tugas dan peran yang berbeda-beda dalam satuan jaringan kerja yang bersifat fungsional. Guru secara formal bertugas mengajar dan mengelola pembelajaran

dengan para siswanya di kelas. Supervisor berfungsi mengadakan pembinaan kepada para guru, agar kinerja mereka berlangsung secara efektif dan efisien, sementara tugas administratur sekolah untuk mengkoordinasikan dan memadukan berbagai ragam aktivitas dalam lingkungan sekolah.

Sebagai organisasi, sekolahpun memanfaatkan prinsip-prinsip birokrasi dalam melayani kerja dan agenda-agenda aktivitasnya. Organisasi formal (termasuk sekolah) menggunakan sebuah pola hubungan yang bersifat legal rasional untuk menggerakkan roda organisasi. Sistem jabatan ini dinamakan birokrasi (*bureaucracy*) yang berarti pengaturan atau pemerintahan oleh pejabat. Menurut Reinhard Bendix,1960 (dalam Robinson,1981) organisasi birokrasi mengandung sejumlah prinsip yaitu sebagai berikut.

- 1) Urusan kedinasan dilaksanakan secara berkesinambungan;
- 2) Urusan kedinasan didasarkan pada aturan dalam suatu badan administratif;
- 3) Tanggung jawab dan wewenang tiap pejabat merupakan bagian dari suatu hierarki wewenang;
- 4) Pejabat dan pegawai administratif tidak memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas;
- 5) Para pemangku jabatan tidak dapat memperjualbelikan jabatan; dan
- 6) Urusan kedinasan dilaksanakan dengan menggunakan dokumentasi tertulis.

Beberapa prinsip birokrasi tersebut diterapkan dalam komposisi peran dan tugas pada masing-masing warga di sekolah. Semuanya disusun menjadi satu susunan struktur kepemimpinan birokratis di mana kepala sekolah menempati pucuk pimpinan formal. Apabila kita amati bersama pusat pelayanan administrasi telah dilimpahkan pada para staf administrasi, para guru dan pejabat struktural lain melaksanakan fungsi tugasnya sesuai status dan wewenangnya. Murid-murid melakukan tertib kegiatan sebagai pelajar dan bahkan sampai petugas kebersihan sekolah sekalipun juga menjadi salah satu bagian penting dari komposisi peran fungsional yang dilembagakan oleh sekolah. Sehingga di lingkungan sekolah tidak ada seorang individupun yang tercecceh statusnya dari jangkauan kekuasaan organisasi.

Selain itu posisi kelembagaan sekolah juga tidak bisa lepas dari konstruksi kekuatan sistem pendidikan makro yang menaungi keberadaan sekolah. Baik sekolah negeri maupun swasta selalu menjadi wilayah koordinasi lembaga dinas pendidikan di tingkat kota, provinsi bahkan sampai kepada departemen terkait di lingkup nasional. Meskipun pengaruh susunan kekuatan lembaga tersebut bersifat gradual di mana semakin memuncak maka koordinasi teknis terhadap sekolah semakin menipis namun dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu wilayah luas yang memperlihatkan jaringan koordinasi kelembagaan dalam sebuah mekanisme organisasi besar berkapasitas makro dan sekolah merupakan bagian-bagian kecil dari lembaga tersebut.

Terminologi sosiologi juga mengungkapkan bahwa organisasi tidak sekadar dipandang suatu kesatuan yang bersifat statis belaka melainkan merupakan sebuah bentuk kesatuan yang selalu dinamis dan sifatnya tergantung pada makna yang diberikan anggota, masyarakat luar serta para klien yang memanfaatkan jasa organisasi (Miflen, 1985). Sebagaimana penuturan August Comte, 1844 ( dalam Sunarto, 2000) mengungkap bahwa lingkup kajian sosiologi mencakup dua bagian besar yakni statika sosial, yaitu suatu kajian terhadap tatanan sosialnya dan dinamika sosial, yaitu suatu kajian terhadap perubahan dan perkembangan sosialnya. Menurut Comte tersebut, kacamata sosiologi melihat organisasi melalui dua aspek pandangan tersebut. Pertama, organisasi dalam koridor statika sosial akan melandasi pembahasan pada aspek struktur, tatanan peran dan fungsi-fungsi formal yang melekat di dalam organisasi. Sedangkan yang kedua yakni segi dinamika sosialnya mengamati dan mempelajari segala bentuk hubungan dinamika para anggota, perubahan-perubahan konstruksi, bermacam interpretasi dan persepsi para anggotanya, ataupun konflik-konflik yang muncul. Sehingga selain memiliki struktur peranan formal, sebuah organisasi akan merangkul pula aneka ragam makna yang ditangkap berbagai macam orang.

Secara sederhana sekurang-kurangnya ada 4 jenis sasaran organisasi sekolah, di mana masing-masing sasaran akan mencakup titik tolak pandangan terhadap organisasi sekolah. Dari empat sasaran tersebut akan kita dapatkan pengertian yang cukup lengkap tentang kompleksitas organisasi sekolah.

- 1) Pertama, sasaran formal. Ruang lingkup sasaran ini meliputi tujuan formal dari sebuah organisasi. Wujud dari sasaran ini tercantum dalam aturan-aturan tertulis, konstitusi dan segala ketentuan formal yang melandasi orientasi organisasi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan sudah semestinya mempunyai organisasi yang baik agar tujuan pendidikan formal ini tercapai sepenuhnya. Kita mengetahui unsur personal di dalam lingkungan sekolah adalah kepala sekolah, guru, karyawan dan murid. Di samping itu sekolah sebagai lembaga pendidikan formal ada dibawah instansi atasan baik itu kantor dinas atau kantor wilayah departemen yang bersangkutan. Di negara kita, kepala sekolah adalah jabatan tertinggi di sekolah itu, sehingga ia berperan sebagai pemimpin sekolah dan dalam struktur organisasi sekolah ia didudukkan pada tempat paling atas. Tuntutan formal organisatoris menghendaki agar tugas-tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan penyelenggaraan sekolah untuk mencapai tujuan dibagi secara merata dengan baik sesuai dengan kemampuan, fungsi dan wewenang yang telah ditentukan. Melalui struktur organisasi yang ada tersebut, orang akan mengetahui apa tugas dan wewenang kepala sekolah, tugas guru dan karyawan sekolah.
- 2) Kedua, sasaran informal. Organisasi pada umumnya tidak sepenuhnya bekerja sesuai ketentuan-ketentuan formal. Dalam banyak hal, mereka dimodifikasi oleh masing-masing anggotanya sesuai dengan kapasitas pemaknaan kesadaran mereka tentang organisasi. Di sekolah, seorang kepala sekolah mungkin mendapat tanggung jawab sebagai pemimpin dan penguasa formal tertinggi. Akan tetapi penerimaan, pola pikir dan tingkah laku kepala sekolah tersebut adalah konstruksi pemahaman subjektifnya dalam melangsungkan hubungan dengan berbagai pihak di lingkungan sekolahnya. Sehingga sasaran informal merupakan interpretasi dan modifikasi sasaran-sasaran formal dari seluruh anggota yang terlibat langsung pada wadah organisasi. Sasaran ini mencakup pula persepsi masing-masing individu dan menjadi tujuan kegiatan pribadi di dalam organisasi. Masing-masing siswa tentunya memiliki tujuan yang bervariasi dalam melangsungkan statusnya sebagai pelajar. Mungkin ada yang berharap mendapat prestasi akademik tinggi atau mengidamkan ijazah dan tidak sedikit pula yang sekadar menjalankan tradisi masyarakat.

Seorang guru dapat saja mengajar hanya untuk mencari gaji namun banyak pula yang masih berpegang teguh pada loyalitas pekerjaan sebagai seorang pendidik.

- 3) Ketiga, sasaran ideologis. Sebagaimana tersirat di dalam istilah tersebut, sasaran ini menyangkut seperangkat sistem eksternal atau sistem nilai yang diyakini bersama. Dalam hal ini, nuansa budaya pada pengertian sebagai suatu sistem pengetahuan, gagasan dan ide yang dimiliki oleh suatu kelompok masyarakat yang berfungsi sebagai landasan pijak dan pedoman bagi masyarakat itu dalam bersikap dan berperilaku dalam lingkungan alam dan sosial tempat mereka bernaung (Goodenough, 1971; Spradley, 1972; Geertz, 1973) dalam Sairin (2002) merupakan penjabaran dari dari pengaruh ideologis terhadap organisasi. Sasaran ini menyoroti pengaruh interaktif kultur-ideologis yang dianut oleh sebagian besar manusia dalam menangkap, menyikapi dan merespon eksistensi organisasi. Masyarakat kita memiliki semangat yang tinggi untuk meraih prestasi vertikal, sementara sekolah merupakan wadah yang cukup strategis bagi manusia untuk menopang ambisi mobilitas vertikalnya. Maka bisa diasumsikan hampir sebagian besar warga sekolah maupun masyarakat akan mengarahkan keyakinan kultural tersebut dalam memaknai keberadaan sekolah
- 4) Keempat, sasaran-sasaran lain yang kurang begitu kuat. Peneakan sasaran ini akan menonjol pada suatu proses aktivitas organisasi yang tengah mempertahankan eksistensinya dalam situasi di luar kondisi biasa. Berkurangnya pendaftaran di sekolah-sekolah dan universitas dapat merubah secara luas peran para guru atau organisasi ruang sekolah, termasuk rasio guru terhadap siswa beserta kelas-kelas yang terspesialisasi. Jika tidak, maka sejumlah besar guru akan terancam menganggur.

Keempat sasaran atau pandangan organisasi tersebut mengisyaratkan suatu pola pandangan yang berbeda dari pandangan umum tentang sekolah. Sebagai organisasi, sekolah bukan sekadar tumpukan peran-peran struktural yang kaku, statis serta jalur-jalur kerja yang serba mekanistik belaka. Mekanisme tersebut mengalami dinamika aktualisasi melalui aneka ragam penafsiran para anggota yang melatarbelakangi perilaku manusia dalam

mengemban peran dan status yang berbeda-beda di dalam organisasi sekolah.

## 2. Sekolah Sebagai Sistem Sosial

### a. Pengertian Sistem

Banyak pendapat tentang pengertian sistem. Namun secara umum pengertian sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja sama secara keseluruhan berdasarkan suatu tujuan bersama. Di dalam sistem masing-masing unsur saling berkaitan, saling bergantung dan saling berinteraksi atau suatu kesatuan usaha yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu dengan yang lainnya, dalam usaha untuk mencapai tujuan dalam lingkungan yang kompleks. Pengertian tersebut selaras dengan pendapat Johnson, Kast dan Rosenwig, 1973 sebagaimana dikutip oleh Soenarya (2000) menyatakan bahwa sistem adalah suatu tatanan yang kompleks dan menyeluruh. Dengan kata lain, satu kesatuan dari sesuatu sehingga merupakan kesatuan yang menyeluruh. Sedangkan Middleton dan Wedemeyer, 1985 memandang sistem sebagai kumpulan dari berbagai bagian (unsur) yang saling tergantung yang bekerja sama sebagai suatu keseluruhan untuk mencapai suatu tujuan, di mana hasil keseluruhan lebih berarti dari pada hasil sejumlah bagian (Soenarya, 2000: 12).

Bachtiar (1985) mengemukakan bahwa sistem adalah sejumlah satuan yang berhubungan satu dengan lainnya sedemikian rupa sehingga membentuk satu kesatuan yang biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu. Pada bagian yang sama, Bachtiar menambahkan bahwa sistem adalah seperangkat ide atau gagasan, asas, metode dan prosedur yang disajikan sebagai suatu tatanan yang teratur. Cleland dan King (1988) menyatakan bahwa sistem adalah sekelompok sesuatu yang secara tetap saling berkaitan dan saling bergantung sehingga membentuk suatu keseluruhan yang terpadu. Adapun menurut Poerwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1988: 849) menyebutkan bahwa sistem adalah (1) seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, (2) susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas dan sebagainya, dan (3) metode.

Mendasarkan pendapat diatas, sesuatu dapat dinamakan sistem bila terjadi hubungan atau interelasi dan interdependensi baik internal maupun eksternal antarsubsystem. Interaksi, intere-

lasi, dan interdependensi itu disebut hubungan internal. Bila interaksi, interelasi, dan interdependensi itu terjadi antarsistem, hubungan itu disebut hubungan eksternal.

Bila hubungan antarsubsistem atau antarkomponen di mana hubungan itu terjadi dengan sendirinya dan tergantung dari subsistem atau komponen lain, hubungan itu disebut hubungan *deterministik*. Sebaliknya, bila hubungan itu tidak pasti bahwa sesuatu itu dapat berfungsi, maka suatu komponen tidak perlu bergantung pada suatu komponen yang lain. Bola lampu mempunyai akibat deterministik terhadap penerangan karena tanpa bola lampu dengan berbagai jenis dan bentuknya akan mengakibatkan kegelapan. Namun terang dan gelap lampu tidak ada hubungannya dengan kipas angin. Hubungan yang demikian itu disebut *nondeterministik*.

Apabila terdapat pengaruh yang menunjang, memperkuat, mempercepat fungsi perubahan atau pertumbuhan suatu sistem atau subsistem, maka hubungan itu menimbulkan pengaruh yang menghambat atau mencegah, maka hubungan itu disebut *disfungsional*.

Lingkungan merupakan batas antara suatu sistem dengan sistem lainnya. Makin terbuka suatu sistem, makin perilakunya terpengaruh oleh lingkungan. Lingkungan suatu sistem merupakan pembeda antara suatu sistem dengan sistem yang lain. Lingkungan dapat merupakan sumber yang memberikan kesempatan kepada suatu sistem untuk berkembang dalam mencapai fungsi dan tujuannya, atau sebaliknya dapat pula merupakan penghambat.

#### b. Sistem Sosial

Salah satu pendekatan di dalam sosiologi yang menggali konsep sistem sosial adalah pendekatan *fungsional struktural*. Sudut pendekatan tersebut menganggap bahwa masyarakat, sebagai suatu sistem fungsional yang terintegrasi ke dalam suatu bentuk *equilibrium*. Fungsional struktural memandang masyarakat seperti layaknya organisme biologis yang terdiri dari komponen-komponen atomistik dan memelihara hubungan integratif-sistemik agar metabolisme kehidupan masyarakat tetap terjaga.

Menurut Nasikun (1984) pendekatan fungsional struktural sebagaimana telah dikembangkan oleh Parson dan para pengi-

kutnya, dapat dikaji melalui sejumlah asumsi dasar sebagai berikut.

- 1) Masyarakat harus dilihat sebagai suatu sistem di mana di dalamnya terdapat bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu sama lain;
- 2) Dengan demikian hubungan pengaruh mempengaruhi antarbagian tersebut bersifat ganda dan interaktif;
- 3) Meskipun integrasi sosial sulit mencapai kesempurnaan, namun secara mendasar sistem sosial cenderung bergerak ke arah *equilibrium* yang bersifat dinamis; menanggapi perubahan-perubahan yang datang dari luar dengan kecenderungan memelihara agar perubahan yang terjadi di dalam sistem beserta akibatnya dapat diminimalisasi;
- 4) Sekalipun disfungsi, ketegangan-ketegangan dan penyimpangan-penyimpangan senantiasa terjadi, namun dalam jangka panjang keadaan tersebut akan berakhir pula melalui penyesuaian-penyesuaian dan proses institusionalisasi. Dengan kata lain, sekalipun integrasi sosial secara sempurna tidak pernah tercapai, akan tetapi setiap sistem sosial akan senantiasa berproses ke arah tersebut;
- 5) Pada dasarnya, perubahan-perubahan sosial timbul melalui tiga macam kemungkinan yaitu (1) penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan oleh sistem sosial itu terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra system change*), (2) pertumbuhan melalui proses diferensiasi struktural dan fungsional, dan (3) serta penemuan-penemuan baru oleh anggota-anggota masyarakat; dan
- 6) Faktor penting yang memiliki kekuatan mengintegrasikan sistem sosial adalah konsensus antaranggota masyarakat tentang nilai-nilai tertentu. Setiap masyarakat, menurut pandangan fungsional struktural selalu memiliki tujuan-tujuan dan prinsip-prinsip dasar tertentu yang mendapat keyakinan kuat dari sebagian besar anggota masyarakat dan dipercaya memiliki kebenaran mutlak. Sistem nilai tersebut bukan sekadar sumber kekuatan yang menyebabkan integrasi sosial, namun sekaligus merupakan unsur yang menstabilkan sistem sosial budaya tersebut.

Dari beberapa asumsi di atas dapat disimpulkan bahwa sebuah sistem sosial merupakan sistem dari tindakan-tindakan manusia. Ia terbentuk dari interaksi sosial yang terjadi antar-berbagai individu, yang tumbuh dan berkembang dalam standar penilaian umum serta mendapat kesepakatan bersama dari para anggota masyarakat. Yang paling penting dari berbagai standar penilaian umum adalah apa yang disebut sebagai norma-norma sosial. Norma-norma sosial itulah yang sesungguhnya membentuk struktur sosial.

Pengaturan interaksi sosial antaranggota masyarakat tersebut dapat terjadi karena komitmen mereka terhadap norma-norma sosial menghasilkan daya untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan-kepentingan pribadi mereka, proses ini memungkinkan bagi mereka untuk menemukan keselarasan antarsatu sama lain sehingga pada proses selanjutnya menghasilkan suatu tingkat integrasi sosial. Dalam posisi tersebut, *equilibrium* terpelihara oleh berbagai proses dan mekanisme sosial. Dua macam mekanisme sosial yang mengendalikan hasrat-hasrat para anggota demi terpeliharanya kontinuitas sistem sosial, adalah mekanisme sosioalisasi dan pengawasan sosial (*social control*).

Dari anggapan-anggapan di atas itulah para penganut fungsional struktural menganggap bahwa disfungsi, ketegangan-ketegangan, dan penyimpangan-penyimpangan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan masyarakat sehingga memunculkan terjadinya diferensiasi sosial yang semakin kompleks, adalah akibat dari pengaruh-pengaruh yang datang dari luar.

Namun anggapan-anggapan tersebut memiliki beberapa kelemahan yang melekat. Kelemahan tersebut terletak pada bahwa pendekatan fungsional struktural mengabaikan beberapa kenyataan, antara lain:

- 1) Setiap struktur sosial selalu mengandung konflik dan kontradiksi-kontradiksi yang bersifat internal, lalu pada gilirannya justru menjadi sumber terjadinya perubahan sosial;
- 2) Reaksi dari suatu sistem sosial terhadap perubahan-perubahan yang datang dari luar (*extra systeme change*) tidak selalu bersifat *adjustive*;

- 3) Sebuah sistem sosial dalam kurun waktu tertentu dapat juga mengalami konflik-konflik sosial yang bersifat *visious circle*; dan
- 4) Perubahan sosial tidak selalu terjadi secara gradual melalui penyesuaian-penyesuaian lunak, akan tetapi juga terjadi secara revolusioner (Nasikun, 1984: 15).

Dari beberapa asumsi tersebut telah jelas bahwa pendekatan fungsional struktural terlalu menekankan asumsi dasarnya pada peranan unsur-unsur normatif dalam menelaah tingkah laku sosial, khususnya proses-proses yang paling mikro di tingkat individu. Pandangan tersebut menegaskan bahwa setiap individu merupakan kontributor teknis yang melembagakan tegaknya norma-norma sosial demi menjamin stabilitas sosial.

Pendekatan tersebut telah melupakan hakikat dualistis yang selalu terkandung dalam realitas hidup. Salah satunya realitas sosial bahwa selain kemapanan empiris yang mencerminkan tertibnya tatanan hidup ada sisi gelap yang terselubung dan perlahan-lahan menjadi potensi konflik yang bersifat laten. Dalam konteks sosialnya, istilah tersebut dinamakan *sub-stratum*, yakni disposisi-disposisi yang mengakibatkan timbulnya perbedaan-perbedaan *life chances* dan kepentingan-kepentingan tertentu.

Oleh karena itulah, maka pendekatan fungsional struktural dipandang kurang lengkap dalam menelaah hakikat sistem sosial.

Beberapa ahli yang lalu mengkritisi teori fungsional struktural menambahkan analisisnya untuk memperlengkap kajian sosiologi tentang sistem sosial. Oleh masyarakat pendekatan mereka dinamakan pendekatan konflik. Pendekatan tersebut memperhatikan kekurangan-kekurangan yang melekat di dalam fungsional struktural lalu mencoba menemukan formulasi teoretis yang lebih representatif. Beberapa asumsi yang dimiliki oleh pendekatan konflik tersebut antara lain yaitu,

- 1) Setiap masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang tidak pernah berakhir atau dengan kata lain, perubahan sosial merupakan gejolak yang melekat dalam setiap masyarakat;
- 2) Setiap masyarakat selalu mengandung konflik-konflik yang terselubung, atau dengan kata lain konflik adalah gejala yang niscaya ada di masyarakat manapun;

- 3) Setiap unsur dalam suatu masyarakat selalu memberikan sumbangan terjadinya disintegrasi dan perubahan-perubahan sosial; dan
- 4) Setiap masyarakat terintegrasi di bawah kekuatan atau dominasi golongan tertentu yang memiliki kekuasaan terhadap sebagian besar masyarakat (Nasikun, 1984: 16-17).

Perubahan sosial oleh para penganut pendekatan konflik tidak saja dipandang sebagai gejala yang melekat pada kehidupan masyarakat, namun lebih dari itu merupakan sumber yang berasal dari faktor-faktor internal di dalam sebuah masyarakat. Perubahan sosial muncul disebabkan oleh pertentangan unsur-unsur sosial. Kontradiksi internal tersebut bersumber pada tegaknya sistem struktur yang tidak merata dalam level kekuasaan. Kenyataan ini menjadi faktor munculnya dua entitas kepentingan yang senantiasa bertentangan yakni, penguasaan otoritas dan mereka-mereka yang dikuasai.

Dari pendekatan konflik dapat disadari satu substansi kodrat sosial yang tidak bisa dilupakan, yaitu dengan perbedaan serta diferensiasi sosial bukanlah sekadar menjadi sarana penyokong integrasi maupun fungsionalisasi peran. Perbedaan juga memiliki peran kontroversial yang memicu merebaknya disintegrasi sosial. Kenyataan ini mendorong terciptanya akomodasi kepentingan yang mampu merombak tatanan sosial untuk menjadi lebih representatif dan berdaya guna bagi masyarakat.

#### c. Sistem Sosial di dalam Sekolah

Sebagai sistem sosial, sekolah merupakan akumulasi komponen-komponen sosial integral yang saling berinteraksi dan memiliki kiprah yang bergantung antara satu sama lain. Zamroni (2001) menyatakan bahwa pendekatan *microcosmis* melihat sekolah sebagai suatu dunia sendiri, yang di dalamnya memiliki unsur-unsur untuk bisa disebut suatu masyarakat, seperti pemimpin, pemerintahan, warga masyarakat atau aturan dan norma-norma serta kelompok-kelompok sosialnya.

Sesuai dengan pendekatan fungsional struktural, lembaga sekolah diibaratkan masyarakat kecil yang memiliki kekuatan organis untuk mengatur dan mengelola komponen-komponennya. Bagian-bagian tersebut diatur dan terintegrasi dalam naungan

sistem kendali sosial berwujud organisasi formal. Pedoman formal merupakan rujukan fundamental dari seluruh latar belakang sikap dan perilaku para penguasaan status dan peran di sekolah.

Pendekatan fungsional struktural melihat lingkungan sekolah pada hakikatnya merupakan susunan dari peran dan status yang berbeda-beda, dimana masing-masing bagian tersebut terkonsentrasi pada satu kekuatan legal struktural yang menggerakkan daya orientasi demi mencapai tujuan tertentu. Tentu saja sistem sosial tersebut bermuara pada status sekolah sebagai lembaga formal.

Keberadaan guru, siswa, kepala sekolah, psikolog atau konselor sekolah, orang tua, siswa, pengawas, administrasi merupakan komponen-komponen fungsional yang berinteraksi secara aktif dan menentukan segala macam perkembangan dinamika kehidupan sekolah sebagai organisasi pendidikan formal. Sehingga di sini fungsional struktural melandasi pandangan kita untuk melihat berbagai peran dan status formal di sekolah sebagai satu-satunya pedoman mendasar atas segala aktivitas yang dilakukan oleh warganya. Seluruh warga penguasaan kedudukan telah tersosialisasi norma-norma sekolah sesuai dengan porsi statusnya sehingga menyokong terbinanya stabilitas sosial dalam sekolah. Manifestasi peran mendasar norma-norma sekolah telah mengikat warganya dalam nuansa integritas kesadaran yang tinggi.

Sementara itu, pendekatan konflik lebih menekankan porsi penilaian subjektif para pelaku peran di sekolah dan konsekuensi objektif atas wujud sekolah sebagai lembaga yang memelihara sistem kekuasaan. Pendekatan konflik melihat sisi lain dari tertibnya perilaku masyarakat sekolah dalam mengamalkan hasrat-hasrat individunya yang senantiasa patuh pada kekuatan normatif. Lockwood melihat bahwa setiap situasi sosial selalu mengandung dua hal yakni tata tertib sosial yang bersifat normatif serta sub-stratum yang melahirkan konflik. Tumbuhnya sistem nilai normatif sebagai acuan utama para pelaku peran di sekolah bukan berarti melenyapkan potensi-potensi konflik. Oleh sebab itu, stabilitas sosial yang dicerminkan oleh pengaturan peran dan status seperti guru, kepala sekolah, pejabat struktural sekolah, pengawas sekolah, murid, administrasi sekolah, orang tua siswa, petugas kebersihan pada dasarnya mencerminkan bentuk penguasaan

turan manifes atas masing-masing kepentingan yang sebenarnya saling bertentangan.

Secara lebih radikal beberapa penganut pendekatan konflik menegaskan bahwa tatanan sosial yang ada (termasuk di sekolah) merupakan hasil kekuasaan dominan baik itu bersumber dari paksaan secara fisik maupun kekerasan simbolik (*symbolic violence*). Artinya kelas sosial dominan memiliki simbol-simbol sosial yang menghegemoni kesadaran seluruh anggota agar sejalan dengan sistem nilai objektif yang pada hakikatnya banyak berpihak pada golongan atau kelas yang berkuasa.

Di dalam sekolah, seorang kepala sekolah selain memiliki kedudukan formal sebagai pemimpin sekolah ternyata juga mengindikasikan pertentangan kepentingan dan otonomi status lain yang lebih rendah, misalnya para guru, staf-staf administrasi dan sebagainya. Terhadap guru, ketika seorang kepala sekolah menjalankan fungsi formalnya, maka ada titik pertentangan yang menggoyahkan otonomi peran guru dalam mengelola belajar mengajar. Di satu sisi kepala sekolah berharap agar siswa berhasil dalam belajar dengan proses pengajaran yang efektif, efisien serta mampu mencapai target penguasaan materi yang banyak. Di sisi lain, harapan yang melambungkan kepentingan status kepala sekolah tersebut tentunya membebani peran sekaligus otonomi kedudukan guru dalam mengelola pembelajaran di kelas.

Faisal dan Yasik (1985) menyatakan bahwa dari pendekatan konflik bisa ditarik dua asumsi dasar yang muncul pada lembaga sekolah. Sebuah lembaga yang memiliki tujuan tertentu dan memelihara banyak status yang berbeda serta memiliki peran fungsional. Aneka ragam status tersebut dikelola melalui fungsi-fungsi otoritas legal formal dengan memanfaatkan prinsip-prinsip birokrasi. Dua asumsi tersebut yakni:

- 1) Potensi konflik dalam mengintegrasikan pemahaman satu tujuan sekolah kepada para pemegang status yang berbeda-beda. Untuk satu tujuan pendidikan, masing-masing pengembangan posisi akan memiliki daya tangkap sektoral yang berbeda-beda dalam mengartikan hasil maupun proses pencapaian tujuan.
- 2) Sulitnya meraih kesamaan persepsi mengenai batas peran dan posisi pendidikan. Sebagai dampaknya, keadaan tersebut memicu konflik internal lintas posisi. Yang dimaksud konflik

peranan internal adalah konflik harapan antarpihak dari pemegang posisi peran di sekolah. Para guru dihadapkan dengan harapan yang saling bertentangan dengan kepala sekolahnya, penilik, petugas konseling, administrator pendidikan, orang tua murid dan bahkan dari muridnya sendiri.

Dari dua pendekatan utama di atas (fungsional struktural dan konflik) dapat diambil kesimpulan bahwa sekolah bukanlah sekadar kumpulan yang terdiri dari para pelaksana administrasi, guru dan murid dengan segala sifat dan pembawaan mereka masing-masing (Horton dan Hunt, 1999: 333). Lebih dari itu, sekolah merupakan suatu sistem sosial yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan mapan, interaksi, konfrontasi, konflik, akomodasi, maupun integrasi yang menentukan dinamika para warganya di sekolah. Oleh sebab itu, di dalam sekolah akan selalu mengandung unsur-unsur dan proses-proses sosial yang kompleks seperti halnya dinamika sosial masyarakat umum .

Beberapa unsur tersebut memproduk konsep-konsep sosial di dalam sekolah yakni sebagai berikut.

#### 1) Kedudukan dalam Sekolah

Sekolah, seperti sistem sosial lainnya dapat dipelajari berdasarkan kedudukan anggota dalam lingkungannya. Setiap orang di dalam sekolah memiliki persepsi dan ekspektasi sosial terhadap kedudukan atau status yang melekat pada diri warga sekolah. Di sana kita memiliki pandangan tentang kedudukan kepala sekolah, guru-guru, staf administrasi, pesuruh, murid-murid serta asumsi-asumsi hubungan ideal antarbermacam kedudukan tersebut. Hal ini selaras dengan pendapat Weber (dalam Robinson, 1981) tentang konsep tindakan sosial, dimana setiap orang memiliki *ideal type* untuk mengukur dan menentukan parameter mendasar tentang sebuah realitas. Realitas sosial yang tersebar dalam status sosial menjadi titik tolak kesadaran seorang individu untuk menentukan sikap, pandangan dan tindakan dalam lingkup sosial tertentu. Harapan ideal “kepala sekolah” merupakan kesadaran awal yang mempengaruhi sikap individu seorang pejabat kepala sekolah. Meskipun pada proses selanjutnya harus terkombinasi dengan pembawaan individu, prasangka terhadap status lain, hubungan-hubungan antarstatus serta kaitannya dengan konstruksi total dari susunan status di sekolah.

Dalam mempelajari struktur sosial sekolah kita analisis berbagai anggota menurut kedudukannya dalam sistem persekolahan. Beberapa kedudukan di bentuk dan dibangun berdasarkan sistem klasifikasi sosial di antaranya adalah,

- a) Kedudukan berdasarkan jenis kelamin, akan mengidentifikasi pelakunya pada perbedaan seks atau kelamin bu guru, pak guru, murid putri, siswa lelaki, pak kepala sekolah dan lain sebagainya. Secara sosial kedudukan berdasarkan seks merupakan pembedaan ruang orientasi atas dasar perbedaan fisik. Perbedaan tersebut merupakan dampak kultural dari masyarakat yang lebih luas, dimana perbedaan kelamin masih mengisahkan pembagian kerja, hak, serta ruang gerak yang berbeda pula. Namun secara struktural perbedaan jenis kelamin tidak begitu mempengaruhi kualitas penerapan ketentuan formal sebuah lembaga. Seorang kepala sekolah wanita tetap saja memiliki otoritas atau kewenangan kekuasaan terhadap para guru lelaki maupun wakasek laki-laki.
- b) Kedudukan berdasarkan struktur formal di lembaga, misalnya kepala sekolah, guru, staf administrasi, pesuruh, siswa dan lain sebagainya. Kategori kedudukan ini dilandasi oleh ketentuan-ketentuan formal yang melembagakan serangkaian peran dan pemetaan kewenangan struktural berdasarkan pembagian wilayah kekuasaan yang bersifat hierarkis. Sesuai dengan formasi struktur lembaga sekolah maka masing-masing posisi menggambarkan tingkat kekuasaan yang bertingkat-tingkat. Posisi teratas menggambarkan puncak pengakuan otoritas tertinggi lalu secara gradual makin berkurang pada posisi-posisi di bawahnya.
- c) Kedudukan berdasarkan usia. Pengakuan terhadap kategori sosial ini didasarkan konstruksi sosial sekolah sebagai lembaga pendidikan. Berangkat dari pengertian tentang pengajaran sebagai sumber dari keberadaan sekolah dan segala aktivitas kelembagaannya. Sementara proses pengajaran tidak lepas dari hubungan antara pengajar dengan yang belajar. Maka bisa ditangkap indikasi kecenderungan dalam lembaga sekolah untuk mengutamakan sistem nilai berdasarkan usia. Mereka yang tua dikonstruksikan sebagai pengajar, teladan, sumber nilai kebaikan, pengontrol moral, berkemampuan tinggi dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, pengakuan kedudukan berda-

sarkan usia sangat kental sekali melekat dalam orientasi warga sekolah.

- d) Kedudukan berdasarkan lahan garap di sekolah. Pada dasarnya tiap-tiap status di sekolah akan membentuk wilayah-wilayah sektoral sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan. Di kelas jenis status yang paling dominan berperan adalah status guru dan murid. Sementara di wilayah birokrasi akan memperlihatkan kontak sosial antara pengurus administrasi baik itu kepala bagian, sekretaris, bendahara sekolah serta staf-stafnya. Di tingkat pelayanan administrasi akan melibatkan pegawai administrasi dengan para siswa, guru-guru dan lain sebagainya.

## 2) Interaksi di Sekolah

Menurut Horton dan Hunt (1999) sistem interaksi di sekolah dapat ditinjau dengan menggunakan tiga perspektif yang berbeda, yakni:

- a) Hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat luar
- b) Hubungan di internal sekolah lintas kedudukan dan peranannya.
- c) Hubungan antarindividu pengemban status atau kedudukan yang sama.

Dalam kategori pertama, hubungan interaktif antara orang dalam dengan orang luar mencerminkan keberadaan sekolah sebagai bagian masyarakat. Para guru, murid dan seluruh warga di sekolah juga pengemban status-status lain di masyarakat. Sehingga interaksi di sekolah merupakan kombinasi berbagai nilai dari masyarakat yang dibawa oleh para warga sekolah. Para guru, kepala sekolah, murid-murid juga bagian dari masyarakat mereka. Mereka membawa sikap dan perilaku ke sekolah, sebagai hasil dari hubungan dengan tetangga, teman, gereja, partai politik dan berbagai ragam kelompok kepentingan.

Sementara secara formal, sekolah memiliki pihak-pihak yang bertanggung jawab mengadakan hubungan antara masyarakat dengan pihak sekolah. Dalam hal ini, pihak yang paling berkepentingan mengadakan hubungan dengan masyarakat adalah pengawas sekolah. Pengawas sekolah bertanggung jawab menjamin kualitas pelaksanaan pendidikan di sekolah sesuai dengan kebu-

tuhan masyarakat. Sementara di tingkat internal pengawas sekolah juga berkewajiban memberikan perlindungan atas orientasi masyarakat sekolah dari tuntutan-tuntutan luar yang kurang masuk akal. Sebagai pengamat atau evaluator pengawas sekolah juga memiliki tugas memelihara keharmonisan hubungan antara kelompok-kelompok yang berbeda di sekolah.

Hubungan antarstatus juga seringkali menimbulkan konflik antarperan. Di dalam sekolah, tanggung jawab penjaga sekolah menyangkut kebersihan bertentangan dengan keinginan warga sekolah untuk menggunakan fasilitas sekolah semaksimal mungkin. Kebebasan profesional guru juga bertentangan dengan kepentingan pengawas sekolah dalam menciptakan kelancaran pengajaran di tiap-tiap kelas. Keinginan kepala sekolah untuk menerapkan inovasi baru harus berhadapan dengan keengganan guru dan murid untuk menerima perubahan. Salah satu konflik yang cukup krusial saat ini adalah konflik keinginan pengawas sekolah untuk mencapai hasil pengajaran yang terbaik sesuai dengan anggaran biaya yang tersedia berhadapan dengan tuntutan organisasi persatuan guru untuk memperoleh jaminan pekerjaan dan gaji yang memadai.

Namun selain menimbulkan konflik, hubungan antarstatus merupakan bagian dari orientasi lembaga sekolah. Secara fungsional untuk mencapai tujuan yang diharapkan sekolah membutuhkan peran dan kiprah dari berbagai status dan kedudukan. Sehingga kerja timbal balik antarstatus diprioritaskan untuk melancarkan proses pencapaian tujuan organisasi. Sekolah membutuhkan hubungan yang harmonis antarguru dan murid agar tujuan pengajaran di kelas dapat tercapai secara maksimal. Sekolah membutuhkan kerja sama antarberbagai pihak agar roda organisasi dapat berjalan dengan lancar.

Hubungan antarindividu atau kelompok dalam jenis status yang sama juga tidak lepas dari bagian interaksi di sekolah. Para guru selain memiliki persamaan peran sesuai statusnya juga menggambarkan berbagai perilaku guru yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan perbedaan karakter, sikap dan pengalaman individu dalam melancarkan aktivitas di sekolah. Kita ketahui bersama untuk status siswa pun juga telah terbentuk aneka ragam karakter dan perilaku individu maupun kelompok yang berbeda-beda.

### 3) Klik Antar Siswa

Pengelompokan atau pembentukan klik mudah terjadi di sekolah. Suatu klik terbentuk bila dua orang atau lebih menjalin persahabatan sehingga dalam keseharian telah terikat pada kehidupan bersama baik di dalam maupun di luar sekolah. Mereka saling merasakan apa yang dialami salah satu anggota kelompoknya dan mampu mengungkapkan perasaan yang selama ini tersembunyi, seperti hubungan mereka dengan orang tua atau dengan jenis kelamin lain serta kesulitan pribadi-pribadi lainnya.

Keanggotaan klik bersifat sukarela dan tak formal. Seorang diterima atau ditolak atas persetujuan bersama. Walaupun klik tidak mempunyai peraturan yang jelas, namun ada nilai-nilai yang dijadikan dasar untuk menerima anggota baru.

Anggota klik merasa diri bersatu dan merasa diri kuat, penuh dengan kepercayaan berkat rasa persatuan dan kekompakan. Mereka mengutamakan kepentingan kelompok di atas kepentingan individual dan sikap ini dapat menimbulkan konflik dengan orang tua, sekolah, dan klik-klik lainnya. Bila klik ini mempunyai sikap anti sosial maka klik itu dapat menjadi "geng".

Orang luar, khususnya orang tua dan guru sering tidak dapat memahami makna klik bagi anggota-anggotanya. Akibatnya mereka justru makin kompak dengan kelompoknya sehingga memicu kesadaran bersama untuk sama-sama membebaskan diri dari kekuasaan dan pengawasan orang tua, sekolah dan lembaga-lembaga lainnya. Dari kelompoknya seorang anggota yakin mendapat bantuan penuh namun sebaliknya harus mampu menunjukkan loyalitas yang tinggi pada kelompok. Mereka yang tidak patuh akan mendapat klaim sebagai pengkhianat.

Faktor yang paling penting dalam pembentukan klik adalah usia atau tingkat kelas. Suatu klik jarang beranggotakan anak yang berusia dua tahun lebih. Selain itu klik biasanya beranggotakan murid dari jenis kelamin yang sama. Tidak ada bukti yang menunjukkan pembentukan klik berdasarkan prestasi akademis atau intelegensi. Menurut pengamatan suatu klik merupakan kelompok minat atau kegemaran yang serupa, misalnya musik, olah raga dan sebagainya.

Klik juga menggambarkan struktur sosial masyarakatnya. Klik menunjukkan stratifikasi sosial yang terdapat dalam masya-

rakat tempat sekolah itu berada. Murid-murid pada umumnya memilih teman dari golongan anak yang secara sosial ekonomi memiliki kedudukan sama.

Klik-klik yang muncul di sekolah beragam wujudnya, tergantung pada perbedaan murid. Ada kemungkinan terbentuknya kelompok berdasarkan kesukaan dari kalangan siswa satu daerah atau karena mereka merupakan minoritas. Ada kelompok "elite" yang terdiri atas anak-anak orang kaya atau menunjukkan prestasi akademis tinggi dan kepribadian tinggi. Adapula kelompok rendahan, yang berasal dari keluarga tidak berpendidikan.